



Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kampung Urumb Kabupaten Merauke

Nurkholis Syukron¹, Andri Irawan^{2*}

^{1&2} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus, Merauke, Indonesia.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir, faktor apa saja mendukung dan menghambat implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kampung Urumb Kabupaten Merauke. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, aset ekonomi produktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan data condensation, data display, dan conclusion drawing/ verifications. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat pesisir di Kampung Urumb sudah berjalan seperti pemberian akses teknologi dan informasi, pembangunan infrastruktur, pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada masyarakat pesisir dan konsisten dalam mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat pesisir Kampung Urumb. Akan tetapi masih banyak memiliki kekurangan seperti keberlanjutan program pelatihan dan pengembangan kemampuan masyarakat, minimnya akses permodalan, dan jaminan pasar dari pemerintah daerah. Faktor penghambat implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir yaitu: rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir, terbatasnya permodalan usaha masyarakat pesisir, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang infrastruktur, keterbatasan usaha masih kurang berperan. Faktor pendukung Implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir yaitu: tersedianya sumber daya alam masyarakat pesisir

Keywords: Implementasi Program; Pemberdayaan Masyarakat; Kawasan Pesisir

Abstrak

This research aims to find out how the coastal community empowerment program is implemented, what factors support and hinder the implementation of the coastal community empowerment program in Urumb Village, Merauke Regency. The type of research used is a qualitative descriptive approach. The focus of this research is increasing capacity, providing access to technology and information, capital, infrastructure, market guarantees, productive economic assets. The data collection techniques used are observation, interviews, documentation. The data analysis techniques used are data condensation, data display, and conclusion drawing/ verification. The results of this research show that the programs provided by the regional government to coastal communities in Urumb Village have been running, such as providing access to technology and information, infrastructure development, providing assistance with facilities and infrastructure to coastal communities and consistently implementing the empowerment program for coastal communities in Urumb Village. However, there are still many shortcomings, such as continuity of training programs and community capacity development, minimal access to capital, and market guarantees from local governments. Factors inhibiting the implementation of coastal community empowerment programs are: low level of knowledge and skills of coastal communities, limited business capital for coastal communities, limited facilities and infrastructure supporting infrastructure, limited business still plays a small role. Supporting factors for the implementation of coastal community empowerment programs are: the availability of natural resources for coastal communities.

Kata Kunci: Program Implementation ; Community Empowerment ; Coastal Areas

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17 ribu pulau dan panjang garis pantai lebih dari 108 ribu kilometer, serta memiliki kekayaan hayati laut terbesar di dunia. Oleh karena itu, Indonesia harus menjadi poros maritim dunia. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara virtual pada puncak Peringatan Hari Maritim Nasional 23 September 2021. Sehingga sampai dengan saat ini wilayah maritim masih menjadi pusat pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sebagai negara maritime yang memiliki potensi sumber daya kelautan dan pesisir yang sangat besar ini semestinya memberikan harapan bagi masyarakat yang berada pada wilayah pesisir. Akan tetapi, pada kenyataannya masyarakat pesisir adalah masyarakat dalam kategori miskin dan tertinggal. Kondisi ini tercermin dari masih banyaknya kemiskinan yang dijumpai pada masyarakat pesisir dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Kriteria kemiskinan tersebut diperlihatkan dengan rendahnya pendapatan nelayan, sehingga mereka masih mengalami kesulitan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar akan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan tingkat Pendidikan yang layak.

Permasalahan utama dalam pembangunan wilayah pesisir adalah lemahnya keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pengembangan kelautan dan wilayah pesisir. Terjadinya masalah tersebut dikarenakan salah satunya adalah lemahnya sistem dan tata cara koordinasi antar stakeholders belum didukung dengan adanya sistem hukum yang mengatur kegiatan tersebut. Selain itu, lemahnya kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi proses partisipatif menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya (Departemen Kelautan dan Perikanan : 2008).

Berkaitan dengan permasalahan di wilayah pesisir tersebut, maka berbagai upaya pemerintah dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. Salah satu model pemberdayaan masyarakat pesisir yang telah dikembangkan secara nasional oleh pemerintah adalah program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya laut dan pesisir secara berkelanjutan. Program PEMP ini diimplementasikan hampir di seluruh daerah pesisir secara serentak di Indonesia, termasuk di Kabupaten Merauke.

Sebagai salah satu upaya untuk penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Merauke, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten melaksanakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir tersebut. Akan tetapi, tidak sepenuhnya program tersebut berjalan dengan baik. Sebab, masih banyak ditemukan masalah dilapangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat pesisir untuk keikutsertaan pelaksanaan program tersebut, serta kurangnya pendampingan dari pemerintah (Irawan & Tanzil : 2020).

Sejalan dengan rencana pemerintah untuk "Menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia" melalui penguatan pembangunan maritim bersama dengan peningkatan tuntutan demokratisasi dan peran masyarakat, Pengembangan kawasan pesisir dan laut dilakukan melalui pendekatan integralistik yang sinergistik dan harmonis. Pendekatan ini mempertimbangkan sistem nilai dan kelembagaan yang berkembang di masyarakat setempat dan sejalan dengan pengembangan sumber-sumber potensi lokal dan kearifan lokal. Proses ini juga memperhatikan pemerataan, keadilan, dan potensi laut.

Menurut teori implementasi kebijakan publik, apa yang telah dilakukan pemerintah selama ini adalah membangun program pemberdayaan masyarakat. Namun, model top down implementasi kebijakan publik, yang lebih menekankan pada kepatuhan yang tinggi dari implementor, kebijakan yang sentralistik, dan ketergantungan pada sistem komando dan kontrol yang ketat, telah mengakibatkan kegagalan implementasi. Kontrol terhadap orang bukanlah cara yang efektif untuk menerapkan kebijakan, kata Hudson (1989). Pembuat kebijakan mestinya menyadari bahwa kebijakan yang paling baik diimplementasikan secara *backward mapping*.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan pesisir pantai yang terisolir sampai saat ini masih diyakini sebagai solusi terbaik menyelesaikan persoalan kemiskinan atau keterbelakangan sosial. Sebagaimana yang diungkapkan Bebbington (2000) bahwa pemberdayaan merupakan proses untuk membuat pihak-pihak yang termarginalisasi dapat berpartisipasi lebih dalam memutuskan tentang bentuk, strategi pengembangan, dan distribusi produk yang dihasilkannya. Pemberdayaan juga sebagai instrumen agar masyarakat yang termarginalkan memiliki akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan dan dapat berpartisipasi dalam proses pengembangan diri.

Banyak hal yang menyebabkan masyarakat terpuruk dan tersungkur dalam standar kualitas hidup yang buruk dan serba kekurangan. Salah satu contohnya adalah bentuk kemiskinan yang sistematis yang berfokus pada kurangnya akses ke pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kondisi ini diperparah oleh ketidakmampuan pemerintah untuk menemukan solusi untuk mengurangi ancaman kemiskinan. Ini terbukti dengan kegagalan beberapa program penghapusan kemiskinan karena mereka tidak mampu menumbuhkan nilai-nilai, kearifan lokal, dan modal sosial.

Arah yang paling efisien dan cepat untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat pesisir adalah dengan melibatkan masyarakat dan bagian pemerintahan yang memiliki kebijakan pembangunan yang lebih reaktif dalam memprioritaskan kebutuhan masyarakat saat mengatur anggaran agar mereka dapat memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Kegagalan ini menyebabkan masalah seperti penyelewengan dana yang disebabkan oleh ketidakmampuan para pengelola untuk mengelola anggaran, yang mengakibatkan banyak program pemberdayaan pemerintah.

Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke selama ini belum sepenuhnya dirasakan oleh nelayan tradisional di pesisir pantai Urumb. Nelayan tetap stagnan di garis kemiskinan karena tidak meratanya bantuan, bahkan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, nelayan tradisional masih menggunakan metode lama untuk menangkap ikan karena tidak ada bantuan peralatan dari pemerintah. Fokus masalah penelitian ini merupakan penjelasan dari kerangka pikir penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi program

pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kampung Urumb Kabupaten Merauke sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir yang meliputi: Peningkatan kapasitas, Pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan asset ekonomi produktif. Penelitian ini juga membahas faktor penghambat implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kampung Urumb.

2. Literature Review/ Theoretical framework

Studi kebijakan biasanya mengacu pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting dalam organisasi, termasuk memilih beragam alternatif dan pemilihan salah satu diantaranya berdasarkan dampak positif dan dampak negatif yang dihasilkan. Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) memberikan pengertian dan pemahaman yang bervariasi. Hal ini dapat dilihat dari sudut pandang kita masing – masing dalam memahami dan memberikan pemaknaan.

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekadar mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu, menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle, 1980). Mengenai hal ini Wahab (2002: 59) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek urgen keseluruhan proses kebijakan. Proses implementasi kebijakan tidak hanya terkait perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, tapi juga lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat memengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun dampak yang tidak diharapkan (*spillover/negatif effects*).

Salah satu bentuk kebijakan yang diyakini mampu untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan atau keterbelakangan sosial di sekitar kawasan pesisir pantai yang terisolir adalah kebijakan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah sebuah upaya yang dilakukan dalam pembangunan dengan berpusat pada manusia. Konsep pemberdayaan awalnya muncul sebagai kritik terhadap paradigma pembangunan yang menempatkan negara terlalu dominan dalam melaksanakan pembangunan. Posisi sentral negara terlalu terlihat dari mulai perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan dan evaluasi. Konsep pemberdayaan ini berasumsi bahwa pembangunan akan berjalan lancar apabila masyarakat diberi akses / kesempatan untuk berhak mengelola sumber daya yang ada untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, memberdayakan adalah meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian masyarakat.

Payne (2015) mengemukakan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) pada hakikatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan kekuatan (*daya*) untuk mengambil keputusan dan Tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Pemberdayaan dilakukan dengan jalan meningkatkan kapasitas, pengembangan rasa percaya diri untuk menggunakan kekuatan dan mentransfer kekuatan dari lingkungannya. Sebagai suatu proses, pemberdayaan adalah usaha yang terjadi secara terus menerus sepanjang hidup. Menurut Kusnadi (2006) ada beberapa indikator kualitatif yang menandai suatu masyarakat nelayan memiliki keberdayaan, yaitu: a) tercapainya kesejahteraan sosial-ekonomi individu, rumah tangga dan masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya ekonomi dan orientasi kewirausahaan meningkat; nilai tabungan dan investasi bertambah; kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, optimal, dan berkelanjutan; serta kondisi kualitas sumber daya manusia (SDM) berkembang baik. b) kelembagaan ekonomi berfungsi optimal dan aktivitas ekonomi stabil-kontinuitas. c) kelembagaan sosial berfungsi dengan baik sebagai instrument pembangunan lokal. d) berkembangnya kemampuan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi; informasi, kapital pasar, dan teknologi. e) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan di Kawasan pesisir dan tumbuhnya kesadaran kritis warga terhadap persoalan-persoalan pembangunan yang ada di Kawasan pesisir. f) Kawasan pesisir menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional yang dinamis, serta memiliki daya tarik investasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep dasar pemberdayaan pada dasarnya yaitu upaya suatu kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki dalam rangka tujuan hidup yang lebih sejahtera. Pemberdayaan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat memiliki inisiatif untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di sekitarnya agar dapat memperbaiki atau meningkatkan kualitas serta kondisi diri sendiri menjadi lebih baik.

Dalam memberdayakan masyarakat dibutuhkan tahap pemberdayaan yang jelas dan terarah, disebutkan tahap-tahap pemberdayaan menurut Suparjan & Hempri S (2003) dalam rangka pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain: (1) meningkatkan kesadaran kritis atau posisi masyarakat dalam struktur sosial politik. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa sumber kemiskinan berasal dari konstruksi sosial yang ada pada masyarakat itu sendiri. (2) kesadaran kritis yang muncul diharapkan membuat masyarakat mampu membuat argumentasi terhadap berbagai macam eksploitasi serta sekaligus membuat keputusan terhadap hal tersebut. (3) peningkatan kapasitas masyarakat; dalam konteks ini perlu dipahami bahwa masalah kemiskinan bukan sekedar persoalan kesejahteraan sosial tetapi berkaitan dengan faktor politik, ekonomi sosial budaya dan keamanan. (4) pemberdayaan juga perlu meningkatkan dengan pembangunan sosial budaya masyarakat.

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) membagi tiga proses pemberdayaan. *Pertama*; tahap penyadaran, target

sasaran adalah masyarakat yang kurang mampu yang harus diberikan “pencerahan” dengan memberikan penyadaran bahwa mereka memiliki hak untuk mampu dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Mereka harus diberikan motivasi bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. *Kedua*; tahap pengkapsitasan, tahap ini terdiri dari tiga jenis pengkapsitasan yaitu pengkapsitasan manusia, organisasi dan system nilai. Pengkapsitasan manusia dilakukan dengan memberikan Pendidikan, pelatihan, dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan keterampilan individu atau kelompok. Pengkapsitasan system nilai dilakukan dengan membuat “aturan main” didalam organisasi yang berupa peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya. *Ketiga*; tahap penyadaran pada tahap ini target sasaran diberikan daya atau kekuatan, kekuasaan, otoritas atau peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki sehingga target sasaran dapat menjalankan kekuasaan yang diberikan dan mampu membawa perubahan lebih baik.

3. Methods

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena melalui penelitian kualitatif peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir Kampung Urumb Kabupaten Merauke dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi disana. Penelitian dilaksanakan di Kampung Urumb Kabupaten Merauke karena kampung tersebut berada dalam Kawasan pesisir pantai dan sebagai kampung lokal.

Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu; melakukan pengumpulan data penelitian melalui observasi, dokumentasi, serta memperkuat data dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD). Data penelitian diperoleh dari informan yang terkait langsung dalam pembangunan masyarakat pesisir Urumb melalui wawancara yang mendalam diantaranya: (1) Kepala Kampung Urumb, (2) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke, (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Merauke, (4) Aparatur Kampung Urumb, (5) serta masyarakat yang menjadi sasaran dari pelaksanaan program pemberdayaan itu sendiri. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), dimana dalam analisis data terdapat tiga aktifitas yaitu: *condensation data*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verification*.

4. Result & Discussion

4.1. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kampung Urumb di Kabupaten Merauke

a. Peningkatan Kapasitas

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir ini sudah dilaksanakan dimasyarakat pesisir Kampung Urumb Kabupaten Merauke sudah tepat, karena dengan adanya program-program dan kegiatan yang dilakukan dimasyarakat pesisir di Kabupaten Merauke diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir. Akan tetapi, yang terjadi dilapangan menurut hasil penelitian tidak semua masyarakat mendapatkan dan merasakan program tersebut.

Kebijakan peningkatan kapasitas itu seharusnya dapat dilakukan melalui kegiatan dan pelatihan, bantuan sarana dan prasarana, peningkatan pembangunan infrastruktur dan melakukan sosialisasi ke masyarakat pesisir untuk terus mengembangkan sumber daya alam yang ada. Kegiatan pelatihan biasanya mereka dapatkan hanya periodic saja, sesuai dengan program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke. Kegiatan yang tidak berjalan dengan keberlanjutan ini membuat masyarakat hanya dijadikan sebatas objek saja. Karena setelah kegiatan usai maka materi yang diterima pun juga selesai. Tidak pernah ada tindak lanjut dari setiap kegiatan pelatihan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir ini.

Selain itu, bantuan sarana prasarana juga sudah pernah diberikan oleh pemerintah. Salah satunya adalah dengan adanya program bantuan kolam terpal untuk budidaya ikan lele ke masyarakat Kampung Urumb. Akan tetapi lagi-lagi program tersebut tidak ada kelanjutannya sehingga setelah satu siklus budidaya selesai maka kolam ikan tersebut juga sudah lagi berjalan. Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan adalah dengan membangun bendungan disepanjang pesisir pantai Urumb yang berfungsi mencegah hantaman ombak. Selain itu juga telah dilakukan pembangunan tempat wisata pantai di sekitar Kampung Urumb. Hal ini dapat dijadikan sebagai nilai tambah kepada masyarakat melalui objek wisata tersebut.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 sebagaimana yang dimaksud pasal 11 huruf a yaitu dilakukan dengan memfasilitasi penyelenggaraan, pendidikan pelatihan dan penyuluhan. Sedangkan menurut “Agustino” (2014:124) mengatakan bahwa implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir yaitu suatu proses yang dilakukan dengan suatu program dan kegiatan yang dilakukan dimasyarakat pesisir baik secara kelompok maupun individu guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini terbukti dengan minimnya pembangunan di wilayah pesisir Kampung Urumb dan hingga saat ini belum terlihat peningkatan kapasitas masyarakatnya.

b. Pemberian akses teknologi dan informasi

Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Merauke memberikan bantuan 60 Unit kapal penangkap ikan yang

disertai dengan jaring kepada nelayan Orang Asli Papua di Merauke. Selain itu juga pada tahun 2023 Dinas Perikanan Kabupaten Merauke telah memberikan bantuan pengadaan sarana prasarana tangkap yang prioritas yaitu Pengadaan Jaring Ikan Ukuran Mata 7 (13-15 Cm) di Kampung Urumb, Matara, dan Waninggap Nanggo di Distrik Semangga. Melalui pemberian bantuan tersebut diharapkan masyarakat kampung dapat memanfaatkan potensi yang melimpah yang selama ini sebagian besar tidak dapat dimanfaatkan oleh nelayan, hal ini disebabkan oleh karena terbatasnya sarana prasarana yang dimiliki oleh masyarakat seperti jaring, perahu dan alat bantu penangkapan yang lain, sehingga mampu meningkatkan kapasitas usaha nelayan untuk peningkatan produktivitas usaha penangkapan, peningkatan produksi perikanan tangkap, pendapatan dan kesejahteraan nelayan.

Hasil penelitian tersebut Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang peran serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b dilakukan dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana teknologi, pengembangan jejaring usaha dan sistem komunikasi.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa dengan adanya pemberian akses teknologi dan informasi terhadap masyarakat pesisir sudah optimalnya atau sudah tersedianya informasi dan penyediaan sarana dan prasarana teknologi yang diberikan ke masyarakat pesisir agar mereka mampu meningkatkan penghasilannya.

c. permodalan

Pada implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir ini sudah sesuai dengan proses yang dilakukan melalui pemberian bantuan permodalan berupa bantuan modal bagi kelompok-kelompok yang ada, fasilitas akses usaha nelayan baik dari pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Merauke maupun dari skema melalui program pemberdayaan Dana Kampung. Akan tetapi, bantuan tersebut sifatnya hanya untuk kelompok dan tidak semua kelompok bisa mendapatkannya. Kesulitan prosedur pembuatan proposal yang harus diajukan dan persyaratan lainnya. Sehingga sampai saat ini masyarakat nelayan di pesisir Kampung Urumb masih kesulitan Ketika ingin mendapatkan bantuan tambahan modal seperti fasilitas kredit usaha perikanan tangkap yang biasanya meliputi perahu, alat tangkap, dan mesin.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori menurut "Gaffar", (2009:295) implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik yang biasanya dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Dengan demikian hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir Kabupaten Merauke telah membantu mewujudkan ekonomi masyarakat pesisir dengan adanya permodalan dari Dinas Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Merauke maupun dari Alokasi Dana Kampung Urumb sendiri.

d. Infrastruktur

Pada implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir ini belum adanya infrastuktur yang memadai, dimana ini bisa dilihat dari pihak Dinas Perikanan Kabupaten Merauke yang hanya terfokus pada pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur secara terprogram setiap tahunnya. Kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan dimasyarakat pesisir itu hanya meliputi pembangunan talut dan penanaman mangrove di pesisir Kampung Urumb. Padahal seharusnya mereka harus mampu untuk melakukan pembangunan Tempat Pemasaran Ikan (TPI), pembangunan dermaga, dan lain sebagainya.

Dapat disimpulkan bahwa terlaksananya suatu program dan kegiatan yang dilakukan dimasyarakat pesisir Kampung Urumb Kabupaten Merauke sedikit demi sedikit sudah menggunakan fasilitas pembangunan yang ada akan tetapi belum optimal sehingga masyarakat pesisir belum mampu untuk keluar dari perangkap kemiskinan.

Hasil penelitian diatas sesuai dengan teori menurut "I Nyoman Sumaryadi", (2005:11) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah "upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Sedangkan teori menurut "Kartasasmita", (1997) Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

e. Jaminan Pasar

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat pesisir Kabupaten Merauke yang telah diberikan jaminan pasar Itu tersedianya harga dan produksi ikan, udang yang didaratkan dipasar dan fasilitasnya berupa akses perbankan, sarana pemasaran, menyediakan informasi pasar, dana kur, kartu kusuka agar masyarakat pesisir bisa menggunakan fasilitas yang ada.

Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah belum mampu memberikan jaminan pasar kepada masyarakat pesisir yang umumnya adalah nelayan tradisional. Hal ini terbukti dengan adanya tengkulak yang membuat harga jual masyarakat menjadi rendah dan biasanya mereka tidak memiliki jejaring untuk menjual hasil tangkapannya di luar. Belum lagi pada saat musim-musim tertentu, hasil tangkapan nelayan dapat melimpah sehingga harga menjadi rendah. Disini terjadi hukum pasar yakni harga ditentukan oleh *supply and demand*. Ketika hasil tangkapan melimpah, seharusnya ibu-ibu nelayan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengolah ikan-ikan tersebut menjadi aneka macam olahan yang dapat bernilai ekonomi tinggi. Akan tetapi faktor sumber daya manusia menjadi kendala sehingga peluang usaha ini belum bisa dikembangkan, dan mereka hanya menjual hasil laut berapapun harganya dari pada tidak terjual dan akhirnya membusuk.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perhatian pemerintah dari dinas Perikanan Kabupaten Merauke belum mampu memberikan jaminan pasar kepada masyarakat pesisir di Kampung Urumb Distrik Distrik Semangga. Sehingga masyarakat pesisir hingga saat ini belum mampu memberdayakan dirinya meskipun hasil tangkapan laut mereka cukup banyak. Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan amanat konstitusi yaitu Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang peran serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf e dilakukan dengan memfasilitasi akses pemasaran, sarana pemasaran, mengembangkan kerja sama kemitraan, mengembangkan sistem pemasaran dan menyediakan informasi pasar.

f. Aset Ekonomi Produktif

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa aset ekonomi produktif yang telah diberikan kepada masyarakat pesisir Kampung Urumb itu berupa benih ikan nila. Distribusi benih ikan nila ini dilaksanakan salah satunya di Distrik Semangga yang merupakan bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke untuk masyarakat Pembudidaya Ikan dalam meningkatkan produksi ikan bagi masyarakat. Alasan utama perlunya peningkatan produksi perikanan budidaya adalah adanya kenyataan pola hidup dan kebiasaan masyarakat yang masih bersifat meramu dengan mengandalkan ikan dari alam sehingga aktifitas penangkapan ikan meningkat dan terjadi pengurangan produksi. Oleh karena itu diperlukan alternatif lain yakni melalui pengembangan usaha budidaya ikan dengan memanfaatkan perairan yang tersedia.

Beberapa permasalahan pengembangan perikanan budidaya di Kabupaten Merauke seperti minimnya infrastruktur utama perikanan budidaya (kolam/tambak ikan), kurangnya induk yang baik, kurangnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat mengenai cara pembudidaya ikan yang baik, kurangnya benih ikan untuk produksi, kurangnya ketersediaan pakan ikan bagi masyarakat, dll.

Arah kebijakan perikanan budidaya Kabupaten Merauke adalah pengembangan perikanan budidaya secara optimal dan berkelanjutan. Kegiatan pembinaan dan pendampingan teknis bagi masyarakat pembudidaya ikan di Kabupaten Merauke dilaksanakan pada beberapa Distrik di antaranya Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring, Distrik Kurik, Distrik Malind dan Distrik Animha. Kegiatan pembangunan bidang Perikanan Budidaya dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP- PB) dari dana APBN Departemen Kelautan dan Perikanan Pusat dan Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana Perikanan Budidaya Kabupaten Merauke yang didanai oleh APBD Kabupaten Merauke.

Program ini telah membawa dampak yang signifikan di masyarakat dengan adanya kesadaran masyarakat lokal mengkonsumsi ikan secara intensif. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan ikan tersebut maka diperlukan ketersediaan ikan di alam. Ketersediaan ikan secara alamiah akan habis oleh kegiatan meramu (mengambil stok yang ada) dan secara otomatis tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Oleh karena itu diperlukan kegiatan perikanan budidaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ikan.

Dapat disimpulkan bahwa aset yang diberikan kemasyarakat pesisir betul sudah ada dengan memfasilitasi dan penyediaan sarana usaha budidaya ikan. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang peran serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kementerian dan pemerintah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat dalam pemberdayaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 huruf f dilakukan dengan memfasilitasi dan penyediaan sarana usaha sehingga masyarakat pesisir mampu meningkatkan ekonominya dan memberdayakan dirinya.

4.2. Faktor Penghambat Dan Pendukung Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kampung Urumb Kabupaten Merauke

1. Faktor penghambat

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir yaitu rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat pesisir khususnya Kampung Urumb seperti terbatasnya ekonomi, kurang pengetahuan tentang penggunaan alat-alat teknologi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, terbatasnya permodalan usaha masyarakat pesisir yang ingin membuka usaha namun masih memiliki keterbatasan dengan ekonomi, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang infrastruktur seperti masih adanya keterbatasan dari pemerintah pembangunan infrastruktur dan masih kurangnya bantuan sarana prasarana, keterbatasan usaha masih kurang berperan yang artinya masyarakat pesisir yang mempunyai usaha namun masih kurang dukungan dari pemerintah daerah.

2. Faktor pendukung

Faktor pendukung implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir itu yaitu: Tersedianya sumberdaya alam masyarakat pesisir dimana Kabupaten Merauke khususnya Kampung Urumb memiliki potensi pesisir yang sangat melimpah baik dari potensi hasil lautnya seperti ikan, udang, dan kepiting maupun kerang bambu (mumu) maupun dari segi pariwisatanya. Hal ini terlihat dari keseriusan Pemerintah Daerah Merauke melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif resmi meluncurkan Kampung Wisata Kategori Rintisan di kawasan pesisir SINAI (Sirapu sampai Anasai), yang meliputi Kampung Urumb, Kampung Waninggap Nanggo, dan Kampung Matara. Pluncuran ini adalah bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan destinasi wisata lokal. kawasan-kawasan ini memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan melalui keindahan alamnya, kekayaan budaya, serta berbagai objek wisata buatan yang sedang dikembangkan. Harapannya, wisatawan akan tertarik untuk menikmati semua keindahan dan

pengalaman unik yang ditawarkan oleh kampung-kampung wisata ini.

5. Concussion

Kebijakan pemerintah yang dilakukan dimasyarakat pesisir Kampung Urumb Kabupaten Merauke yaitu pemberian akses teknologi dan informasi, pembangunan infrastruktur, pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada masyarakat pesisir dan konsisten dalam mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat pesisir Kampung Urumb Kabupaten Merauke sehingga implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir sudah dilaksanakan sesuai dengan amanat konstitusi, akan tetapi masih banyak memiliki kekurangan seperti keberlanjutan program pelatihan dan pengembangan kemampuan masyarakat, minimnya akses permodalan, dan jaminan pasar dari pemerintah daerah.

Faktor penghambat implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir Kampung Urumb Kabupaten Merauke yaitu: rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir, terbatasnya permodalan usaha masyarakat pesisir, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang infrastruktur, keterbatasan usaha masih kurang berperan. Sedangkan Faktor pendukung Implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir yaitu: tersedianya sumber daya alam masyarakat pesisir, jumlah masyarakat yang cukup banyak, serta sudah adanya kebijakan pemerintah.

6. References

1. Anggara Sahya. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik*. Pustaka Setia. Bandung
2. Creswell, John W. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
3. David Osborne, Ted Gaebler. 1999. *Mewirauahakan Birokrasi ; Reinventing Government*. Pustaka Binaman Presindo : Jakarta.
4. Davis, Keith. 2000. *Perilaku Dalam Organisasi*, Edisi ketujuh. Erlangga : Jakarta.
5. Denhardt, Janet V & Denhardt, Robert B. 2013. *Pelayanan Publik Baru: Dari Manejemen Steering ke Serving*. Kreasi Wacana: Bantul.
6. Denzin, Norman K & Lincoln, Yvonna S. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
7. Denhardt, Janet V. dan Denhardt, Robert B. 2003. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. M.E. Sharpe, Armonk, New York, London, England.
8. Dye Thomas R. 1981. *Understanding Public Policy Making*, New York- Holt, Rinehart & Winston.
9. Newman, W. L. 1997. *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*, (ed. 3), USA : Allyn and Bacon.
10. Nikijuluw, V.P.H., 2001. *Aspek Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Strategi Pemberdayaan Mereka Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Secara Terpadu*. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
11. Karsidi, Ravik. 2001. Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Pambudy dan A.K.Adhy (ed.): *Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani*, Bogor: Penerbit Pustaka Wirausaha Muda.
12. Kartasasmita, G. 1996. *Power and Empowerment: Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
13. Kusnadi. 2006. *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung: Humaniora.
14. Mathew B. Miles & A. Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode - Metode) Baru*. UI Press : Jakarta.
15. Mikkelsen, B. 2011. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
16. Murray G. Ross with B.W. Lippin *Community organization : theory, principles, and practice*. Harper & Row : New York.
17. Pratchett, Lawrence. Gerry, Stocker. Vivien, Lowndes. 2009. *Empowering communities to influence local decision making (A systematic review of the evidence)*. University Southampton : United Kingdom.
18. Soetomo. 2008. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
19. Wahab. SA. 2017. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara. Jakarta.
20. Agustining, (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung.
21. Aziz, Moh. Ali dkk, 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Nusantara.
22. Budi Winarno. 2002:102. *Kebijakan Publik, Teori Dan Proses*. Yogyakarta: Media
23. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun Dalam Solichin (2008: 71). *The top down approach*.
24. Daniel Mazmanian Dan Paul Sabatier (Agustino, 2012). *Implementation And Publik*.
25. Edmund Husserl : *The Idea Of Phenomenology*. Edward III. George C. (1980). *Implementing Public Policy*.
26. Ife Jim. 2006. *Development : Creating Community Alternatives, Vision, Analysis & Practice*. Australia : Logman.